

# Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Akhmad Qastalani

NPP. 29.1055

*Asdaf Kabupaten Katingan, Provins Kalimantan Tengah*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: laniakhmad@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Covid-19 began to hit Indonesia in March 2020 which made the country's economy decline. In response to this precarious situation, the Indonesian government created various assistance programs, one of which is the Village Fund Cash Direct Assistance (BLT-DD) program specifically for villagers whose economies are affected by the pandemic. **Purpose:** The purpose of writing this thesis is to know and understand the level of effectiveness of the management of BLT-DD carried out in Katingan Regency and know, understand and explain what are the problems that can hinder the course of BLT-DD. **Method:** Measuring the effectiveness of BLT-DD mining in Katingan Regency, the author uses the theory of effectiveness according to Sondang P. Siagian as an analysis knife with qualitative research methods that are descriptive by conducting interviews, and documentation. **Result:** From the research that the author conducted, it shows that the implementation of the BLT-DD program in Katingan Regency has not been effective. In its implementation, there are still some problems, especially the limited village budget and the delivery of constrained regulations to remote areas. For this reason, it is necessary to assist the village and coordinate with P3MD related to BLT and direction to the village to carry out musdesus related to the BLT budget.

**Keywords: Effectiveness of Management, BLT-DD, Covid-19 Countermeasures**

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Covid-19 mulai melanda Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 yang membuat perekonomian negara mengalami penurunan. Menanggapi situasi genting ini, pemerintah Indonesia membuat berbagai program bantuan yang salah satunya adalah program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) diperuntukkan khusus untuk warga desa yang perekonomiannya terdampak akibat pandemi. **Tujuan:** Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah guna mengetahui dan memahami tingkat efektivitas daripada pengelolaan BLT-DD yang di dilaksanakan di Kabupaten Katingan serta mengetahui, memahami dan menjelaskan apa saja permasalahan yang dapat menghambat jalannya BLT-DD. **Metode:** Pengukuran tingkat efektivitas pengeloan BLT-DD di Kabupaten Katingan, penulis menggunakan teori efektivitas menurut Sondang P. Siagian sebagai pisau analisis dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang penulis laksanakan menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT-DD di Kabupaten Katingan belum berjalan dengan efektif. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan terutama anggaran desa yang terbatas dan penyampaian regulasi terkendala kepada daerah pelosok. Untuk itu perlu dilakukan pendampingan kepada desa dan koordinasi dengan P3MD

terkait BLT serta pengarahan kepada desa untuk melaksanakan musdesus terkait anggaran BLT.

**Kata Kunci: Efektivitas Pengelolaan, BLT-DD, Penanggulangan Covid-19**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar, tidak hanya berdampak kepada kesehatan badan juga, namun juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Banyak sektor usaha masyarakat tutup, pemutusan hubungan kerja, dan penurunan penyerapan tenaga kerja (Joharudin et al., 2020). Virus ini sangat dirasakan oleh masyarakat terutama di Kabupaten Katingan. Dana Bantuan Langsung Tunai pada awal dimulai pada bulan april 2020 dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.205/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Penyaluran dana desa terkait Bantuan Lansung Tunai diajukan dalam 3 tahap dengan ketentuan Tahap 1 paling cepat bulan Januari sebesar 40%, Tahap 2 paling cepat bulan Maret sebesar 40%, dan Tahap 3 paling cepat bulan Juni sebesar 20%. Kabupaten Katingan merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang terdampak Covid 19. Akibatnya, terdapat 154 desa di Katingan dan banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari hari. Bantuan Langsung Tunai sangat diperlukan untuk membantu masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dari anggaran yang besar dari dana desa Katingan Anggaran 2020 adalah senilai Rp147.441.003.000,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ribu Rupiah) (Perbup Katingan No.50 Tahun 2020). Kemudian, pemerintah desa melalui anggaran dan belanja desa (APBDes) setiap desa di Kabupaten Katingan tahun 2020 wajib menyediakan anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.300.000 perbulan selama 12 bulan (sumber Perbub No .50 tahun 2020). Dalam pelaksanaan anggaran tersebut pasti memiliki kendala terutama pada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Katingan yang menangani 154 desa di Katingan.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Permasalahan dalam program BLT selama pandemi Covid 19 diatas, agar program ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai tujuan yang akan dicapai maka perlu adanya pengukuran efektivitas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yakni dalam konteks penyaluran bantuan dari pemerintah dalam meringankan beban perekonomian warga desa yang terdampak oleh pandemi covid-19. Penelitian Refendy Paat, Sofia Pangemanan, Frans Singkoh berjudul *Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan (Universitas Sam Ratulangi)*, menemukan bahwa Dari aspek aplikasi dilapangan, peneliti menyimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur sudah tepat sasaran. Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT dan merupakan pelaku langsung di lapangan. Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Wiiwin Wijayanti, Kustanto, Sri Tomo yang berjudul *Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Langsung Tunai Di Kantor Kepala Desa Nringo Dengan Menggunakan Alogaritma Simple Additive Weighting*. Dalam penelitian ini berisikan mengenai Terciptanya sebuah sistem pendukung keputusan penentuan penerima bantuan langsung tunai berbasis web untuk kantor kepala desa. Penelitian berikutnya yaitu dari Ramdhan Witarsa, Mufarizudin, Sularno yang berjudul *Penyuluhan Dan Musyawarah Desa Khusus Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Des (Universitas Pahlawan Tuanku*

*Tambusai*). Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kriteria masyarakat penerima BLT dan peruntukannya.

#### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana objek yang diteliti oleh penulis yaitu Pengelolaan BLTDD, terletak pada fokus dan lokus penelitian, penulis mengambil judul Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian akan dibahas dan diukur menggunakan teori efektivitas menurut Sondang P. Siagian

#### 1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Katingan dan mengetahui faktor penghambat serta upaya yang dilakukan pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Katingan dalam meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai.

## II. METODE

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan bertujuan untuk menggambarkan kejadian atau fakta yang ada dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Selain itu penulis juga menganalisis data dengan beberapa langkah yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Katingan menggunakan teori efektivitas menurut Sondang P. Siagian dimana indikator yang digunakan meliputi: Kejelasan tujuan yang dicapai, Kejelasan Strategi pencapaian tujuan, Proses analisis dan kebijaksanaan yang mantap, Perencanaan yang matang, Penyusunan program yang tepat, Tersedianya sarana dan prasarana, Pelaksanaan yang efektif dan efisien, Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Adapun pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut:

### 3.1. Kejelasan Tujuan Yang Dicapai

Pengelolaan BLT merupakan tanggung jawab desa untuk setiap warga, namun kita sebagai induk dari desa yang ada di Katingan mengharapkan agar bantuan tersebut dilaksanakan seratus persen kepada masyarakat dan tepat waktu. Oleh sebab itu Dinas PMD bergerak cepat dalam pelaksanaan pembuatan regulasi apabila program itu ada dan segera di informasikan kepada seluruh perangkat desa.

Tabel 1

Realisasi Bantuan Langsung Tunai Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Tahun 2020

| No  | Kecamatan Katingan Tengah | Pagu Dana Desa | Realisasi blt dd |            |            |            |            |            |         |         |         |
|-----|---------------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
|     |                           |                | Bulan 1          | Bulan 2    | Bulan 3    | Bulan 4    | Bulan 5    | Bulan 6    | Bulan 7 | Bulan 8 | Bulan 9 |
| (1) | (2)                       | (3)            | (4)              | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)    | (11)    | (12)    |
| 1.  | Desa Tumbang Lahang       | Rp 982.954.000 | 99.000.000       | 99.000.000 | 99.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0       | 0       | 0       |
| 2.  | Desa Tewang               | Rp 866.009.000 | 18.000.000       | 18.000.000 | 18.000.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0       | 0       | 0       |

|     | Panjang              |                     |             |             |             |            |            |            |   |   |   |
|-----|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---|---|---|
| 3.  | Desa Petak Puti      | Rp<br>807.176.000   | 26.400.000  | 26.400.000  | 26.400.000  | 15.900.000 | 15.900.000 | 15.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.  | Desa Telok           | Rp<br>870.319.000   | 70.200.000  | 70.200.000  | 70.200.000  | 43.200.000 | 43.200.000 | 43.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.  | Desa Samba Danum     | Rp<br>1.602.958.000 | 18.780.000  | 18.780.000  | 18.780.000  | 63.000.000 | 63.000.000 | 63.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6.  | Desa Samba Bakumpai  | Rp<br>1.097.831.000 | 97.200.000  | 97.200.000  | 97.200.000  | 55.500.000 | 55.500.000 | 55.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.  | Desa Samba Katung    | Rp<br>1.297.402.000 | 152.400.000 | 152.400.000 | 152.400.000 | 76.200.000 | 76.200.000 | 76.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8.  | Desa Napu Sahur      | Rp<br>776.849.000   | 25.800.000  | 25.800.000  | 25.800.000  | 5.100.000  | 5.100.000  | 5.100.000  | 0 | 0 | 0 |
| 9.  | Desa Batu Badinding  | Rp<br>1.128.079.000 | 114.000.000 | 114.000.000 | 114.000.000 | 57.000.000 | 57.000.000 | 57.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Desa Rantau Asem     | Rp<br>912.838.000   | 92.400.000  | 92.400.000  | 92.400.000  | 46.200.000 | 46.200.000 | 46.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Desa Mirah Kalanaman | Rp<br>844.135.000   | 52.800.000  | 52.800.000  | 52.800.000  | 26.100.000 | 26.100.000 | 26.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Desa Tumbang Kalemei | Rp<br>1.087.174.000 | 91.800.000  | 91.800.000  | 91.800.000  | 54.900.000 | 54.900.000 | 54.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Desa Tumbang Marak   | Rp<br>901.167.000   | 76.200.000  | 76.200.000  | 76.200.000  | 38.100.000 | 38.100.000 | 38.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Desa Tumbang Hangei  | Rp<br>1.063.360.000 | 107.400.000 | 107.400.000 | 107.400.000 | 53.700.000 | 53.700.000 | 53.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Desa Tumbang Pariyei | Rp<br>823.907.000   | 78.000.000  | 78.000.000  | 78.000.000  | 39.000.000 | 39.000.000 | 39.000.000 | 0 | 0 | 0 |

Berdasarkan tabel 1 Target Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam setiap tahapnya adalah dapat tersalurkannya kepada seluruh masyarakat yang sudah terdata disetiap desanya. Hanya saja pada tahun 2020 belum terealisasi secara keseluruhan terdapat 23 dari 154 desa di Kabupaten Katingan.

### 3.2. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Kejelasan strategi pencapaian tujuan merupakan rencana yang dilakukan agar tujuan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan. Terdapat beberapa sub indikator terkait kejelasan strategi pencapaian tujuan yaitu wawasan waktu, dampak, pemusatan upaya, pola keputusan, peresapan. Terkait waktu pengelolaan BLT disaat ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maka pihak Dinas langsung membuat regulasi terkait kegiatan BLT dan segera di informasikan kepada pihak desa agar dapat mempersiapkan berkas pengajuan agar dana dapat dicair. Kemudian, kendala terhadap jaringan yang minim di beberapa desa yang jauh dari ibukota kabupaten pihak dinas mengirimkan dokumen melalui kantor pos agar lebih cepat sampai. Kemudian, rencana yang sudah dipersiapkan dampak lumayan bagus setiap desa dapat merealisasikan anggaran desa kepada program BLT. Hanya saja ada 23 desa pada tahun 2020 yang tidak mampu memberikan bantuan rata – rata pada 3 bulan terakhir akibat anggaran terpotong oleh program pembangunan desa. Namun, itu bukan masalah terlalu besar dan rumit pihak dinas memberitahukan kepada perangkat desa yang tidak memiliki anggaran yang cukup pada program BLT agar segera melakukan Musyawarah Desa Khusus dengan membuat berita acaranya. Juga untuk kapasitas SDM Dinas PMD cukup karena memiliki Staf dengan pendidikan S1.

### 3.3. Proses Analisis Dan Kebijakan Yang Mantap

Proses analisis dan kebijakan yang mantap maksudnya adalah bagaimana kita melihat situasi dan kondisi yang ada dilapangan kemudian bagaimana kita membuat prosedur tetap yang akan kita laksanakan. Terdapat 2 sub indikator yaitu pedoman dan pengambilan keputusan. Terkait SOP pelaksanaan sangat jelas bahwa kita mengacu pada pemerintah pusat terkait BLT ini terutama pada peraturan menteri keuangan nomor 40 tahun 2020 yang mengatur detail Bantuan Lansung Tunai dan kita melanjutkan regulasi kepada pemerintahan desa. Kita pun dari dinas memiliki SOP sendiri bahwa uang tersebut langsung cair ke kas desa dan tidak ada satu pun dari pihak dinas mengelola uang tersebut.

### 3.4. Perencanaan Yang Matang

Perencanaan yang matang merupakan kunci dalam melaksanakan kegiatan agar berhasil sesuai yang diharapkan. Namun, tidak sedikit akibat perencanaan yang belum matang dan sempurna akhirnya kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik. Ada tiga sub indikator yaitu jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek.

### 3.5. Penyusunan Program Yang Tepat

Penyusunan program yang tepat memiliki sub indikator yaitu sasaran, prosedur, dan anggaran. Terkait sasaran terkait BLT ini dengan kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan, kartu sembako dan kartu pra kerja. Kemudian, untuk anggaran itu sendiri dalam Peraturan Menteri Keuangan/No 156/PMK.07/2020 yaitu Rp.600.000,00 untuk bulan pertama sampai bulan ketiga per keluarga penerima manfaat dan Rp.300.000,00 untuk bulan keempat sampai dengan seterusnya ke per keluarga penerima manfaat.

### 3.6. Tersedianya Sarana Dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana sangat diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam hal ini pengelolaan sarpras dalam program bantuan langsung tunai memiliki sub indikator yaitu sarana dan prasarana yang memadai, mempercepat pelaksanaan kegiatan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Tabel 2

Rekapitulasi Barang Aset Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Katingan Tahun 2020

| No | Nama Barang                       | Jumlah Barang | Kondisi Barang |
|----|-----------------------------------|---------------|----------------|
| 1. | Kendaraan Roda 2                  | 18            | Baik           |
| 2. | Kendaraan Roda 4                  | 5             | Baik           |
| 3. | Perangkat Komputer                | 35            | Baik           |
| 4. | Alat Komunikasi dan Jaringan      | 45            | Baik           |
| 5. | Peralatan Rumah Tangga dan Kantor | 500           | Baik           |
|    | Jumlah                            | 603           |                |

Menurut tabel 2 diatas terlihat bahwa barang aset kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa cukup banyak. Kendaraan roda 2 dengan jumlah 18, kendaraan roda 4 dengan jumlah 5, perangkat computer dengan jumlah 35, alat komunikasi dan jaringan dengan jumlah 45, dan peralatan rumah tangga dan kantor dengan jumlah 500.

### 3.7. Pelaksanaan Yang Efektif dan Efisien

Pelaksanaan yang efektif dan efisien merupakan progres inti dalam kegiatan apapun. Apabila kegiatan terjadi permasalahan dianggap tidak efektif dan efisien. Dalam hal ini sub indikatornya yaitu rancangan yang sudah ditetapkan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan, sasaran dan target yang dicapai.

Tabel 3  
Data Desa Yang Bermasalah Terkait BLT Di Kabupaten Katingan

| No  | Nama Desa            | Total Calon Penerima BLT DD (KK) | Realisasi BLT (KK) |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|----------------------|----------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |                      |                                  | Bulan 1            | Bulan 2 | Bulan 3 | Bulan 4 | Bulan 5 | Bulan 6 | Bulan 7 | Bulan 8 | Bulan 9 |
| 1.  | Desa Tumbang Lahang  | 165                              | 165                | 165     | 165     | 200     | 200     | 200     | 0       | 0       | 0       |
| 2.  | Desa Tewang Panjang  | 30                               | 30                 | 30      | 30      | 35      | 35      | 35      | 0       | 0       | 0       |
| 3.  | Desa Petak Puti      | 44                               | 44                 | 44      | 44      | 53      | 53      | 53      | 0       | 0       | 0       |
| 4.  | Desa Telok           | 117                              | 117                | 117     | 117     | 144     | 144     | 144     | 0       | 0       | 0       |
| 5.  | Desa Samba Danum     | 313                              | 313                | 313     | 313     | 210     | 210     | 210     | 0       | 0       | 0       |
| 6.  | Desa Samba Bakumpai  | 162                              | 162                | 162     | 162     | 185     | 185     | 185     | 0       | 0       | 0       |
| 7.  | Desa Samba Katung    | 254                              | 254                | 254     | 254     | 254     | 254     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.  | Desa Napu Sahur      | 43                               | 43                 | 43      | 43      | 17      | 17      | 17      | 0       | 0       | 0       |
| 9.  | Desa Batu Badinding  | 190                              | 190                | 190     | 190     | 190     | 190     | 190     | 0       | 0       | 0       |
| 10. | Desa Rantau Asem     | 154                              | 154                | 154     | 154     | 154     | 154     | 154     | 0       | 0       | 0       |
| 11. | Desa Mirah Kalanaman | 88                               | 88                 | 88      | 88      | 87      | 87      | 87      | 0       | 0       | 0       |
| 12. | Desa Tumbang Kalemei | 153                              | 153                | 153     | 153     | 183     | 183     | 183     | 0       | 0       | 0       |
| 13. | Desa Tumbang Marak   | 127                              | 127                | 127     | 127     | 127     | 127     | 127     | 0       | 0       | 0       |
| 14. | Desa Tumbang Hangei  | 179                              | 179                | 179     | 179     | 179     | 179     | 179     | 0       | 0       | 0       |
| 15. | Desa Tumbang Pariyei | 130                              | 130                | 130     | 130     | 130     | 130     | 130     | 0       | 0       | 0       |
| 16. | Desa Asem Kumbang    | 75                               | 75                 | 75      | 75      | 75      | 75      | 75      | 0       | 0       | 0       |
| 17. | Desa Tewang Kadamba  | 99                               | 99                 | 99      | 99      | 99      | 99      | 99      | 0       | 0       | 0       |
| 18. | Desa Tumbang Paku    | 116                              | 116                | 116     | 116     | 116     | 116     | 116     | 0       | 0       | 0       |
| 19. | Desa Tumbang Malawan | 56                               | 56                 | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 0       | 0       | 0       |
| 20. | Desa Kuluk Leleng    | 28                               | 28                 | 28      | 28      | 28      | 28      | 28      | 0       | 0       | 0       |
| 21. | Desa Tumbang Pahanei | 110                              | 110                | 110     | 110     | 110     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22. | Desa Tumbang Dakei   | 59                               | 59                 | 59      | 59      | 59      | 59      | 59      | 0       | 0       | 0       |
| 23. | Desa Perigi          | 76                               | 76                 | 76      | 76      | 76      | 76      | 76      | 0       | 0       | 0       |

Dari tabel 3 dapat diamati bahwa 23 desa dari 154 desa dikatingan yang tidak dapat merealisasikan BLT secara penuh terutama pada bulan ketujuh sampai bulan kesembilan. Bahkan desa Tumbang Pahanei tidak bisa merealisasikan BLT dari bulan kelima. Hal ini terjadi karena anggaran desa sudah terpakai untuk pembangunan desa.

### 3.8. Sistem Pengawasan dan Pengendalian Yang Bersifat Mendidik

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik merupakan tahap evaluasi yang sangat diperlukan agar suatu kegiatan di lain hari dapat berjalan dengan baik. Sub indikatornya yaitu penentuan ukuran atau pedoman baku, penilaian terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan, pelaksanaan pekerjaan yang sudah dikerjakan, dan perbaikan. Pada tahun 2020 tidak ada masalah yang terlalu berlebihan dan masyarakat di 155 desa masih kondusif dikarenakan kami juga dari pihak dinas selalu mendesak seluruh desa untuk melaksanakan program itu walaupun dengan anggaran yang terbatas. Kemudian, tentunya setiap program

pasti ada kekurangan apalagi BLT ini baru dimulai pada tahun 2020 tentunya pasti akan ada penyesuaian untuk tahun kedepan dan melakukan evaluasi kepada desa. Tidak lupa juga yang terpenting koordinasikan kepada pendamping desa (P3MD) untuk program BLT ini.

### **3.9 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar, tidak hanya berdampak kepada kesehatan badan juga, namun juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Banyak sektor usaha masyarakat tutup, pemutusan hubungan kerja, dan penurunan penyerapan tenaga kerja (Joharudin et al., 2020). Virus ini sangat dirasakan oleh masyarakat terutama di Kabupaten Katingan. Dana Bantuan Langsung Tunai pada awal dimulai pada bulan April 2020 dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.205/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Penyaluran dana desa terkait Bantuan Langsung Tunai diajukan dalam 3 tahap dengan ketentuan Tahap 1 paling cepat bulan Januari sebesar 40%, Tahap 2 paling cepat bulan Maret sebesar 40%, dan Tahap 3 paling cepat bulan Juni sebesar 20%. Kabupaten Katingan merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang terdampak Covid 19. Akibatnya, terdapat 154 desa di Katingan dan banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan Langsung Tunai sangat diperlukan untuk membantu masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dari anggaran yang besar dari dana desa Kabupaten Katingan Anggaran 2020 adalah senilai Rp147.441.003.000,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ribu Rupiah) (Perbup Katingan No.50 Tahun 2020). Kemudian, pemerintah desa melalui anggaran dan belanja desa (APBDes) setiap desa di Kabupaten Katingan tahun 2020 wajib menyediakan anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.300.000 perbulan selama 12 bulan (sumber Perbup No .50 tahun 2020). Dalam pelaksanaan anggaran tersebut pasti memiliki kendala terutama pada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Katingan yang menangani 154 desa di Katingan.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Katingan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Katingan belum berjalan dengan efektif melihat bahwa indikator efektivitas menurut Sondang P. Siagian belum terpenuhi. Hal ini terjadi karena perubahan regulasi akibat pandemi covid-19 diharuskan dengan cepat disampaikan terutama ke desa yang kesulitan jaringan di daerah pelosok. Anggaran yang terbatas karena sudah terpakai untuk pembangunan desa juga menjadi kendala untuk program BLT di kabupaten Katingan.
2. Beberapa permasalahan yang menghambat pengelolaan program BLT-DD adalah sebagai berikut:  
Dinamika sehingga perlunya dengan cepat regulasi yang ada harus disampaikan terutama ke desa yang kesulitan jaringan di daerah pelosok, Keluhan masyarakat dan resiko pemotongan dana desa 50% karena tidak terlaksana bantuan secara penuh.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi:  
Dinas PMD Katingan selalu melakukan pendampingan dan komunikasi dengan perangkat-perangkat desa dan pendamping desa, Dinas PMD Katingan mengarahkan kepada desa untuk melakukan musyawarah desa khusus dengan membuat berita acara bahwa BLT tidak terlaksana 100 persen untuk dilampirkan sebagai bukti agar bisa ditindak lanjuti supaya tidak ada pemotongan dana desa pada tahap kedua.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni keterbatasan kemampuan penulis, keterbatasan waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masi awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam mensukseskan penyelesaian penelitian.

## VI DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, U. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Bltd) Di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupatensidoarjo Nafida. 3(2), 6.
- Atas, P., Menter, P., & Nomor, K. (2021). [www.Jdih.Kemenkeu.Go.Id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id).
- Bender, D. (2016). Desa - Optimization Of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations. *Acm International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Desa, D. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), 1–16.
- Donni Juni Priansa. (2013). Teori Efektivitas. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Gibson, & Donelly. (2001). Organisasi, Terjemahan Agus Dharma. 120.
- Government Regulation In Lieu Of Law No 1. (2020). Budgeting And Stability Policy National Budgeting System For Covid-19 Pandemic Disasters And Management Of The National Economic Threat And Stability Budgeting System. 1(1).



- Journal, C. D., Witarsa, R., & Bantuan, P. (2021). Penyuluhan Dan Musyawarah Desa Khusus Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. 2(2), 410–417.
- Kementerian Keuangan Ri. (2018). Buku Saku Dana Desa. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020. Pdtt, Pemendes, 16, 32.
- Naoum. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana., 3(September), 119–122.
- Ninla Elmawati Falabiba. (2019). Efektivitas. 31–58.
- Ninla Elmawati Falabiba. (2019). Konsep Umum Pengelolaan. 15–33.
- Ninla Elmawati Falabiba. (2019). Qualitative Inquiry & Research Design.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N. 2019(1), 46.
- Penatausahaan, P. D. A. N., Dan, P., Serta, P., Dan, M., Hibah, E., & Bantuan, D. A. N. (2021). Gubernur Kalimantan Tengah. 6, 1–6.
- Peraturan Pemerintah. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Apbn (Pp. 1–8).
- Pramanik, N. D. (2020). Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19. Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora, 01(12), 113–120. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/209/149>
- Saheb, S., Slamet, Y., Sosiologi, A. Z.-J. A., & 2018, U. (2013). Peranan Modal Sosial Bagi Petani Miskin Untuk Mempertahankan Kelangsungan Hidup Rumah Tangga Di Pedesaan Ngawi (Studi Kasus Di Desa Randusongo. Jurnal Analisa Sosiologi, 2(1).
- Selatan, K. M. (2021). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Eksekutif, 1(1), 1–11.
- Sonia Apriani. (2013). Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, Diy. Journal Of Chemical Information And Modeling, 53(9), 1689–1699.
- South, N., Tinagon, J., & Rondonuwu, S. (2016). Measurement Efficiency And Effectiveness Regional Financial Management In Dinas. Jurnal Emba, 4(1), 613–622.
- The Purple Perils A Selection Of James J. (n.d.).
- Wijayanti, W., Kustanto, & Tomo, S. (2017). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Langsung Tunai Di Kantor Kepala Desa Ngringo Dengan Menggunakan Algoritma Simple Additive Weighting. Tikomsin, 5(1), 20–26. <https://p3m.sinus.ac.id/jurnal/index.php/tikomsin/article/view/283>
- Witcher, B. J. (2020). Peraturan Bupati Katingan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.